PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

THE INFLUENCE OF TAX COLLECTION AND TAX ARREAR TO TAX REVENUE

Oleh:
Mohammad Hasan
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: mohammadhasanatep@@gmail.com

ABSTRACT

Tax Revenue on the in Office Tax Primary In The City Of Bandung registered in DGT Regional Office of West Java. I did not hit the target, even though tax revenue on in Office Tax Primary In The City Of Bandung increase. This happens because the taxpayer does not pay off the tax underpayments and increasing tax debt. This study aims to determine the effect of tax collection and tax arrears of the tax revenue in the in Office Tax Primary In The City Of Bandung period 2013-2015. The purpose of this study to analyze the Tax Collection and Tax Arrears on Tax Revenue in Office Tax Primary In The City Of Bandung period 2013-2015.

The research method in this research is descriptive and verification method with quantitative approach. To determine the Tax Collection and Tax Arrears against Acceptance testing data using Multiple Linear Regression, Classical Assumption Test and t test on hypothesis testing.

These results indicate that the variables significantly influence the tax collection, tax revenue and tax arrears variables significantly influence tax revenue in the Office Tax Primary In The City Of Bandung period 2013-2015.

Keywords: Tax Collection, Tax Arrears, Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1991:2). Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:106). Sedangkan penerimaan pajak menurut (Muhammad Zain, 2005:11), Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara.

Peran penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zakiah M Syahab, 2008). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat (Budi Harsono, 2006).

Penerimaan pajak adalah Sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah (Suparmoko, 2000:50). Untuk meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa

pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya (Zain, 2005:30). Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang lebih tinggi dari wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Zain, 2005:30).

Setiap tahunnya penerimaan pajak di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun dalam setiap tahunnya tidak ada yang mencapai target yang diharapkan, namun penerimaan pajak di Indonesia tetap meningkat, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Penagihan pajak bertujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak, surat tagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang terutang pajak sebanyak 95% mau membayar pajak setalah diberikan surat ketetapan pajak (Riskon Ginting, 2006).

Direktorat Jendral Pajak mengakui saat ini kemampuan pegawainya dalam melakukan penagihan piutang atau tunggakan masih sangat kurang, terutama untuk menghadapi wajib pajak yang bersifat preman maka di dalam internal kita kapasitas harus ditingkatkan seperti juru sita, seksi penagihan,itu di area yang SDM kita masih kurang, harus ada kealihan sendiri menghadapi premanisme, ia mengatakan pemerintah tidak bisa selalu menyalahkan kondisi perekonomian global sebagai penyebab perlambatan penerimaan pajak. Dia menilai tidak maksimalnya upaya penagihan pajak menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak (Fuad Rahmany, 2011).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat selama kurun waktu lima tahun terakhir terdapat lebih dari Rp225 triliun pajak yang kurang bayar. Jumlah tersebut diketahui dari pelaporan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2011 hingga 2015.

Jika dirinci per tahunnya, pada tahun 2011 terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp32,78 triliun, kemudian sempat menurun di tahun 2012 menjadi Rp26 triliun. Namun, selama tiga tahun terakhir terjadi kenaikan kurang bayar secara signifikan. Tercatat, di tahun 2013 pajak kurang bayar mencapai Rp44,68 triliun, kemudian sebesar Rp44,19 di tahun 2014, dan Rp77,47 triliun pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang terus meningkat (Edi Slamet Irianto, 2015).

Tunggakan Pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar. Hal ini sering dihadapi oleh setiap kantor pajak. Dari jutaan masyarakat masih banyak yang belum membayar pajaknya. Untuk itu pemerintah akan menertibkannya sehingga penerimaan negara meningkat (Fuad Rahmany, 2011). Dedi Rudaedi (2011) mengatakan agar tunggakan pajak (piutang pajak) tersebut tidak menjadi kadaluarsa maka Direktorat Jenderal Pajak perlu mengupayakan berbagai macam upaya untuk menghindari piutang kadaluarsa tersebut, yaitu dengan lebih mengintensifkan proses penagihan baik secara persuasif maupun secara aktif kepada para penunggak pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Masih menurut Dedi Rudaedi (2011) Penagihan secara persuasif dilakukan dengan menghimbau atau melakukan konseling kepada para penunggak pajak agar melunasi utang pajaknya sedangkan penagihan secara aktif merupakan serangkaian kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, meliputi kegiatan pencarian data melalui sumber data eksternal, pemblokiran rekening penunggak pajak, melakukan Cegah dan Tangkal (Cekal) terhadap penunggak pajak dan tindakan paksa badan (*gijzeling*) terhadap penunggak pajak dengan kondisi tertentu.

Untuk yang bisa ditagih, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu berani mengambil langkah-langkah tegas agar piutang pajak tertagih. Ada pembiaran sehingga piutang menjadi tak tertagih, semua piutang pajak harus diinvertarisasi. Berdasarkan hasil BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat jumlah piutang pajak per 31 Desember 2013, mencapai Rp 103,24 triliun. Piutang pajak per 31 Desember 2014 mencapai Rp. 91,77 triliun. Dari piutang pajak tahun 2014 yang tak tertagih Rp 47,25 triliun. Dengan demikian, piutang yang masih bisa tertagih per 31 Desember mencapai Rp 44,52 triliun. Pada tahun 2015 piutang pajak yang masih bias tertagih mencapai Rp. 67 triliun itu artinya angka tersebut masih tinggi piutang pajaknya (Gunadi, 2015).

Oleh karena itu, jangan sampai berawal dari menunggak menjadi hukum yang berbicara. Sudah banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan dana dari sistem

pemungutan pajak, baik dari pihak wajib pajak maupun dari pemerintah sendiri. Faktor eksternal tidak berdampak signifikan terhadap lambatnya pembahasan APBN-Perubahan (Gunawan, 2012).

Dengan berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti memutuskan mengambil judul**: "Pengaruh Penagihan Pajak Dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Realisasi penerimaan pajak belum mencapai target pada tahun 2013, 2014, dan 2015.
2. Jumlah penagihan pajak yang masih belum optimal.
3. Tunggakan pajak yang dihitung dan dilaporkan sendiri kepada KPP semakin meningkat.

1.3 Rumusan Masalah:

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Seberapa besar pengaruh tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali dan memahami lebih mendalam teori-teori dan asumsi-asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh. Selain itu untuk mengetahui besar pengaruh penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Dari paparan masalah yang telah disebut di atas. Penulis mempunyai tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk dijadikan sebagai bahan masukan memecahkan masalah penerimaan pajak, dengan menguji empiris penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Dari hasil penelitian ini bahwa sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan dengan mengkaji empiris pengaruh penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak serta menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya bahwa penerimaan pajak masih belum optimal setiap tahunnya, dibutuhkan pengaruh penagihan pajak dan tunggakan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:125) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.1.1.2 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Soemarso (2007:60) indicator penagihan pajak yaitu Kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan pajak yang terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.1.2 Tunggakan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:84) tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan**.**

2.1.2.2 Indikator Tunggakan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:135) indikator tunggakan pajak yaitu jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:30) penerimaan pajak yaitu penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak menurut Suparmono dan Theresia (2010:1) adalah Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat naik turunnya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:38) menjelaskan antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan pajak. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Oleh karena itu tindakan penagihan pajak secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan pajak dapat mencapai target.

Teori tersebut didukung oleh beberapa pnelitian yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yudiawati (2013) menjelaskan bahwa Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Semakin sering dilakukan penagihan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I.

2.2.2 Pengaruh Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:325) adalah pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung.

Pernyataan John Hutagaol tersebut didukung oleh beberapa peneltian. Menurut Elisabeth Tilana Mutiara Putri (2015) hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa variabel NJOP dan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB, namun jumlah SPPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB. (2) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis tersebut, maka dapat diajukan hipotesis pengaruh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak sebagai berikut :

H_1: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2: Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian menurut Sugiyono (2012: 2) adalah metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis".

Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012:8) yaitu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif menurut Umi Narimawati (2010:29) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Umi Narimawati (2010:29) metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan unutk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak .

3.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan topik Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak, maka peneliti membedakan dua variabel yang digunakan yaitu variabel bebas (*Independent Variable*) dan variabel terikat (*Dependent Variable*) akan diuraikan sebagai berikut:

1) Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pengaruh Penagihan Pajak (X1) dan Tunggakan Pajak (X2). Berdasarkan teori yang telah dikumpulkan maka penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dan, tunggakan pajak merupakan jumlah pajak yang masih di bayar menurut ketentuan perundang-undangan.

2) Variabel Terikat *(Dependent Variabel)*

Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam Penelitian ini yang menjadi variabel terkait adalah Penerimaan Pajak (Y) dan indikatornya adalah jumlah realisasi penerimaan pajak.

Untuk lebih jelasnya tentang hubungan variabel tersebut digunakan desain secara detail dalam tabel 3.1

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *kuantitatif* yaitu data diolah, disajikan, dan dianalisa untuk melihat pengaruh penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak , penagihan pajak dan tunggakan pajak pada salah satu KPP Pratama di Bandung dari tahun 1983-2015. Pemilihan tahun 1983-2015, didsarkan pada penerapan SAS dimulai 1983. Jumlah=32 tahun.

3.4.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah berupa data jumlah nominal SKPKB, data jumlah utang pajak dan data realisasi penerimaan pajak pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung dengan data bulanan selama 36 bulan periode 2013-2015. Pengambilan sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat I
2. Kantor Pelayanan Pajak yang memberikat surat izin melakukan penelitian
3. Data jumlah nominal SKPKB, data jumlah utang pajak dan data realisasi penerimaan pajak yang lengkap dari tahun 2013-2015 untuk dilakukan penelitian
4. Data diambil dari tahun 2013-2015 yang dijadikan sampel karena pada rentang periode ini terdapat fenomena untuk dijadikan penelitian dan sudah memenuhi syarat dalam pengambilan sampel data.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Dalam penulisan laporan ini, penulis mengambil data secara langsung pada objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Survei

Penelitian ini dilakukan dengan survei langsung pada salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Bandung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2. Dokumentasi

Bersamaan dengan survey tersebut pengumpulan data yang dibutuhkan atau dengan cara mencatat data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang dimiliki instansi.

2) Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian kepustakaan ini adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, buku, hasil penelitian yang sejenis dan media lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan metodologi penelitian, dan sebagainya. Selain itu, penulis juga menggunakan media internet sebagai penelusuran informasi mengenai teori maupun data-data penelitian yang dilakukan.

3) Riset Internet (*Online Research*)

Pengumpulan data berasal dari situs-situs yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Rancangan Analisis Data

Penulis melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik.

3.6.1.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi linear berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan *Multiple Linear Reggression* sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti, antara lain:

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi linear berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan *Multiple Linear Reggression* sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti, antara lain:

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikasi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Mendeteksi apakah data terdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah garfik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas (Husein Umar, 2011:181).

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu :

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
2. Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal.

b) Uji Multikolinearitas

Menurut Husein Umar (2011: 177) mendefinisikan uji multikolinieritas yaitu untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang

sangat besar, tetapi pada pengujian pearson koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan.

$$\text{VIF} = \frac{1}{1 - \text{R}_{i2}}$$

Dimana R_{i2} adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel bebas X_1 terhadap variabel bebas lainnya. Dapat disimpulkan bahwa:

1) Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2) Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Untuk mengatasi terjadinya multikolinieritas dapat diupayakan melalui hal-hal sebagai berikut:

1) Evaluasi apakah pengisian data telah berlangsung secara efektif atau terdapat kecurangan dan kelemahan lain;
2) Jumlah data ditambah lagi;
3) Salah satu variabel independen dibuang karena data dari dua variabel independen ternyata mirip atau digabungkan jika secara konsep relatif sama;
4) Gunakan metode lanjut seperti regresi bayesian atau *regresi tolerance*.

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011:179) mendefinisikan uji heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolutdari residual (error). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Cara pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai produksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot.*

d) Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182) mendefinisikan uji autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian.

Untuk data cross section, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Jika ya, telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikan menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi autokorelasi.

Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai Durbin Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilain statistik Durbin-Watson. Kriteria uji: bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

1) Jika D-W < dL atau D-W > 4 – dL, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi.
2) Jika dU < D-W < 4 – dU, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi.
3) Tidak ada kesimpulan jika dL ≤ D-W ≤dU atau 4 – dU ≤ D-W ≤ 4-dL.

Apabila hasil uji Durbin-Watson tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak maka dilanjutkan dengan runs test. Pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi, dijabarkan pada table 3.3.

Dalam hal ini penulis melakukan analisis. Dari hasil analisis tersebut akan dapat hasil analisis penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Selain itu, metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda.

3.6.1.2 Analisis Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2012:192) analisis regresi linear berganda digunakan untuk melakkukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen Y dan variabel independen X_1 dan X_2. Bentuk persamaan dari regresi linear berganda ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak
X_1 : Penagihan Pajak
X_2 : Tunggakan Pajak
α : Konstanta Intersep
β_1 : Koefisien Regresi Variabel Penagihan Pajak
β_2 : Koefisien Regresi Variabel Tunggakan Pajak
ε : Tingkat Kesalahan (*error term*)

Arti koefisien β menunjukkan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat jika bernilai positif (+). Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat dan sebaliknya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah hubungan yang telah ada mempunyai kadar tertentu, maka harus melihat dua hal. Pertama, ada (dalam pengertian nyata atau berarti) atau tidak ada keterkaitan antara Penerimaan Pajak (Y) dengan Penagihan Pajak (X_1) dan Tunggakan Pajak (X_2).

Regresi linear berganda dengan dua variabel bebas X_1 dan X_2 metode kuadrat kecil memberikan hasil bahwa koefisien-koefisien a, b_1, dan b_2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$\Sigma y = na + b_1\Sigma X_1 + b_2\Sigma X_2$
$\Sigma X_1 y = a\Sigma X_1 + b_1\Sigma X_1^2 + b_2\Sigma X_1 X_2$
$\Sigma X_2 y = a\Sigma X_2 + b_1\Sigma X_1 X_2 + b_2\Sigma X_2^2$

(Sumber: Sugiyono, 2012: 279)

3.6.1.1 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah dinyatakan dalam positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi dapat dinyatakan $-1 \leq R \leq 1$ apabila:

1) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif.
2) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif.

Interprestasi dari nilai koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

(a) Jika r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika variabel independen naik, maka variabel dependen turun, dan jika variabel independen turun, maka variabel dependen naik).

(b) Jika r = +1 atau mendekati +1, maka terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen dan hubungannya searah (jika variabel independen naik, maka variabel dependen naik, dan jika variabel independen turun, maka variabel dependen turun).

Untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X_1 dan Y serta Variabel X_2 dan Y, adalah sebagai berikut :

(a) Menghitung koefisien korelasi antara Penagihan Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y), menggunakan rumus:

$$rx_1y = \frac{\Sigma x_1 y}{\sqrt{\Sigma x_1^2 \cdot \Sigma y^2}}$$

(b) Menghitung koefisien korelasi antara Tunggakan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y), menggunakan rumus :

$$rx_2y = \frac{\Sigma x_1 y}{\sqrt{\Sigma x_2^2 \cdot \Sigma y^2}}$$

3.6.1.2 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Ridwan dan Sunarto (2007:81)

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

Tujuan metode koefisien determinasi berbeda dengan koefisien korelasi berganda. Pada metode koefisien determinasi, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak (lebih memberikan gambaran fisik atau keadaan sebenarnya dari kaitan penagihan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak).

3.6.1.5 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:159) definisi hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel *independent* (X) yaitu Penagihan Pajak (X_1) dan Tunggakan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak sebagai variabel *dependen* (Y).

a. Hipotesis penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis parsial antara variabel bebas Penagihan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.
   Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan Pajak oleh Penagihan Pajak.
   Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan Pajak oleh Penagihan Pajak.
2. Hipotesis parsial antara variabel bebas jumlah Tunggakan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.
   Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan Pajak oleh Tunggakan Pajak.

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan Pajak oleh Tunggakan Pajak.

3. Hipotesis secara keseluruhan antara variabel bebas Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.
   Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan Pajak oleh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak
   Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan Penerimaan Pajak oleh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak.

b. Hipotesis Statistik

1) Pengujian hipotesis secara parsial (Uji Statistik t)

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu pihak (one tail test) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol (Ho) :

$\beta \leq 0$ dan hipotesis alternatifnya (Ha) : $\beta > 0$

Ho : $\beta \leq 0$: Penerimaan Pajak tidak dipengaruhi signifikan oleh Penagihan Pajak.

Ha : $\beta > 0$: Penerimaan Pajak dipengaruhi signifikan oleh Penagihan Pajak.

Ho : $\beta \leq 0$: Penerimaan Pajak tidak dipengaruhi signifikan oleh Tunggakan Pajak.

Ha : $\beta > 0$: Penerimaan Pajak dipengaruhi signifikan oleh Tunggakan Pajak.

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu pihak (*one tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu Hipotesis nol (H_0) : $\beta = 0$ dan Hipotesis alternative (H_a) : $\beta \neq 0$.

H_0:β=0: Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

H_a:$\beta\neq$0: Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

H_0:β=0: Tunggakan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

H_a:$\beta\neq$0: Tunggakan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

a) Menguji Signifikansi

Peneliti melakukan uji signifikansi untuk mencari makna pengaruh variabel X terhadap Y. Uji ini terdiri dari pengujian secara simultan dan parsial.

Nilai F dari hasil perhitungan diatas kemudian diperbandingkan dengan F_{tabel} atau F yang diperoleh dengan mempergunakan tingkat resiko atau *signifikacance* 5% dan *degree of freedom* pembilang dan penyebut, yaitu V_1 =m dan V_2 =(n-m-l) dimana kriteria yang digunakan adalah :

jika $F_{hitung} \leq F_{tebel}$ maka Ho diterima

jika $F_{hitung} > F_{tebel}$ maka Ho ditolak

Bila terjadi penolakan Ho, maka dapat diartikan sebagai adanya pengaruh signifikan dari variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh komponen, variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, digunakan pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t), yaitu dengan membandingkan t_{tabel} dan t_{hitung} yang dirumuskan sebagai berikut :

$$t = \frac{r_{YXi}\sqrt{n-m-l}}{\sqrt{1-r_{YXi}^2}}$$

Sumber : Sugiyono, 2009

Dimana :

r_{YXi} = korelasi parsial X1dengan Y n = ukuran sampel

m = banyaknya komponen variabel bebas

Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tarif nyata 0,05. Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan adalah sebagai beikut :

" Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka terima Ho artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan."

Nilai t tabel bisa ditemukan dengan bantuan tabel distribusi t *student* yang sudah terseda secara umum, dengan ketentuan pencarian α =0,05 dan derajat kebebasan atau dk = (n-k-1).

b) Menggambar daerah penerimaan dan penolakan

Untuk menggambar daerah menerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :

a. Jika thitung ≥ ttabel maka Ho ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka Ho ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
c. t hitung; dicari dengan rumus perhitungan t hitung, dan
d. t tabel dicari di dalam table distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut, α = 0,05 dan dk = (jumlah data- 2).

c) Penarikan Kesimpulan

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika t_{hitung} dan F_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak yang diberikan. Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95 %, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95 % dan hal ini menunjukan adanya dan tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan perhitungan besar pengaruh dari variabel antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak sebesar 10,2% sementara sisanya sebesar 89,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti jumlah wajib pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penagihan pajak yang tinggi akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Hasil pengujian hipotesis penagihan Pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) karena nilai t-hitung (-2,685) > t-tabel (-1.692) berada pada daerah penolakan $H_{0,}$ dengan kata lain H_a diterima, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Hasil Peniltian ini pun didukung dengan teori Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto (2011:38) menjelaskan antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan pajak. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Oleh karena itu tindakan penagihan pajak secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan pajak dapat mencapai target.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini , pengujian data pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung menjelaskan bahwa Penerimaan Pajak tidak sesuai target apabila terjadinya peningkatan pada jumlah penagihan pajak atas SKPKB. Sesuai dengan fenomena yang terjadi, bahwa penerimaan pajak tidak susuai target dikarenakan seberapa besar jumlah penagihan pajak yang meningkat. Apabila jumlah penagihan pajak atas SKPKB lebih tinggi tiap tahunnya maka jumlah ini tidak sebanding dengan target penerimaan pajak yang dicapai.

Dengan adanya pengaruh penagihan pajak atas SKPKB terhadap penerimaan pajak, diharapkan petugas pajak lebih giat lagi melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya ,dengan cara meningkatkan kerjasama dengan wajib pajak dan memberikan pengetahuan dan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak. Penagihan pajak harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sebab penerbitan SKPKB hendaknya dilakukan secara tepat waktu agar penanggung pajak merasa terpantau atau terawasi oleh KPP sehingga dapat memperkecil penanggung pajak dalam usahanya untuk menunda-nunda pelunasan pajak kurang bayar sehingga terlampaui daluwarsa penagihan pajak. Semakin giat dilakukan penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga jumlah SKPKB tiap tahunnya bisa menurun.

Hal ini sejalan dengan penelitian Gita Rostiani (2013) hasil penelitian menunjukan bahwa hasil Uji T (Parsial) menunjukan bahwa masing-masing variabel yaitu penagihan pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dan variabel surat paksa pajak

berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil uji F (Simultan) menunjukan penagihan pajak dan surat paksa pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 60,3%.

4.2 Pengaruh Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan perhitungan besar pengaruh dari variabel antara tunggakan pajak dengan penerimaan pajak sebesar 57%% sementara sisanya sebesar 43% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti jumlah pencairan tunggakan pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tunggakan pajak yang tinggi akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Hasil pengujian hipotesis Tunggakan Pajak (X2) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) karena nilai t-hitung (7.290) > (1,692) berada pada daerah penolakan H_0, dengan kata lain H_a diterima, artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Hasil Peniltian ini pun didukung dengan teori John Hutagaol (2007:325) adalah pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung.

Pengujian data pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung menjelaskan bahwa Penerimaan Pajak tidak sesuai target apabila terjadinya peningkatan pada jumlah tunggakan pajak. Sesuai dengan fenomena yang terjadi, bahwa penerimaan pajak tidak susuai target dikarenakan seberapa besar jumlah tunggakan pajak yang meningkat. Apabila jumlah tunggakan lebih tinggi tiap tahunnya maka jumlah ini tidak sebanding dengan target penerimaan pajak yang dicapai.

Dengan adanya pengaruh tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak, pihak kantor pelayanan pajak harus harus memiliki strategi agar tunggakan pajak dapat dikurangi sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Strategi ini seperti pendekatan persuasif seperti melakukan komunikasi yang aktif dengan Wajib Pajak, memberikan motivasi, pelayanan yang baik, penegakan hukum, hingga mengajak tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan dalam membayar pajaknya sehingga wajib pajak berminat untuk membayar utang pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ika Adelina Sinaga (2016) menunjukan bahwa hasil analisis kontribusi penerimaan pajak dan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 102,18% kriteria kinerja keuangannya dinilai sangat baik. Pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 81,85% kriteria kinerja keungannya dinilai sangat baik. Dan pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 86,95% kriteria kinerja keungannya dinilai sangat baik. Rata-rata kontribusinya adalah sebesar 89,99% dan kriteria kinerja keuangannya dinilai sangat baik. Dengan demikian kriteria kinerja keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara dinilai sangat baik. Diharpakan KPP Pratama Bekasi Utara dapat memperthankan atau meningkatkan lagi potensi penerimaan pajak guna kemajuan pembangunan nasional.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak, maka peneliti mengambil kesimbulan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pengaruh Penagihan Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y) pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung periode 2013-2015. Semakin tingginya jumlah penagihan pajak maka jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target. Masalah yang terjadi pada penerimaan pajak yaitu tidak mencapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh penagihan pajak yang tinggi karena wajib pajak tidak melunasi pajak kurang bayar.
2. Bahwa terdapat pengaruh Tunggakan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y) pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung periode 2013-2015. Semakin tingginya jumlah tunggakan pajak maka jumlah penerimaan pajak akan menurun, Masalah yang terjadi pada penerimaan pajak yaitu tidak mencapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh tunggakan pajak yang tinggi karena wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dan cenderung melalaikannya.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1) Saran Praktis/Operasional

a) Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak, disarankan untuk salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung agar penerbitan SKPKB hendaknya dilakukan secara tepat waktu dan penanggung pajak merasa terpantau atau terawasi oleh KPP sehingga dapat memperkecil penanggung pajak dalam usahanya untuk menunda-nunda pelunasan pajak kurang bayar sehingga terlampaui daluwarsa penagihan pajak.

b) Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui tunggakan pajak disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung harus memiliki strategi agar tunggakan pajak dapat dikurangi sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Strategi ini seperti pendekatan persuasif seperti melakukan komunikasi yang aktif dengan Wajib Pajak, memberikan motivasi, pelayanan yang baik, penegakan hukum, hingga mengajak tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan dalam membayar pajaknya sehingga wajib pajak berminat untuk membayar utang pajaknya.

2) Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas ruang lingkup penelitian dan mencari lebih banyak lagi faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak selain variabel independen yang telah diteliti pada penelitian ini. Peneliti lain dapat meneliti dengan memperbanyak jumlah sampel, menambah variabel independen lainnya serta tempat dan waktu penelelitian yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Yudiawati. 2013. *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dan Implikasinya Pada Pertumbuhan Ekonomi*, Skripsi, Bandung.

Budi Harsono. 2006. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Cet 8. Jakarta: Djambatan.

Dedi Rudaedi. 2011. *Ditjen pajak amankan penerimaan pajak 2011*. Diakses pada http://www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-amankan-penerimaan-pajak-2011.

Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta.hlm.135.

Edi Slamet Irianto. 2015. dikutip dari: https://pemeriksaanpajak.com/2016/02/29/kurang-bayar-wajib-pajak-pada-2011-2015-capai-rp-22512-triliun/

Elisabeth Tilana Mutiara Putri. 2015. *Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai jual Objek Pajak, Dan Tunggakan Pajak Terahadap Penerimaan pajak Bumi Dan Bangunan.*

Erly Suandy. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.hlm.84 .

Fuad Rahmany, M.A. 2012. *Buku Panduan Sensus Pajak Nasional;* Direktorat Jenderal Pajak.

Gunadi. 2015. Dikutip dari http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=14332&q=&hlm=

Gunawan. 2012. *medanbisnisdaily.com*, 2 Januari.

Ida Zuraida L. Y dan Harisih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak, Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 37-38.

John Hutagaol. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.hlm.325.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.hlm.125.

Muhammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.hlm.11

Muhammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.hlm.30

Rochmat Soemitro. 1991. *Asas dan Dasar Perpajakn 2*, PT Eresco, Bandung.hlm.2

Riskon Ginting. 2006. *Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak*. Jurnal Ekonomi & bisnis. Vol 5 No 1. Maret 2006.

Soemarso, S.R. 2007. Perpajakan : Pendekatan Komprehensif. Jakarta : Salemba Empat.hlm.60

Sugiyono. 2011. Metode *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. hlm.159.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm.8-192.

Suparmoko dan Maria R. Suparmoko, 2000. *Pokok-Pokok Ekonomika,* Yogyakarta: Penerbit BPFE.hlm.50.

Suryadi. 2006. *Jurnal Keuangan Publik*, Volume 4, Nomor 1, April 2006: 105-121.

Theresia dan Supramono. 2010. Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI. hlm.1.

Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih asa Sukses. hlm.30.

Umar Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.177-182.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis. hlm.29-41.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Penagihan Pajak (X_1)	Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2010:68)	Kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan pajak yang terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Soemarso (2007:60)	Rasio
Tunggakan Pajak (X_2)	Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. Siti Resmi (2007:40)	Jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Diaz Priantara (2012:135)	Rasio

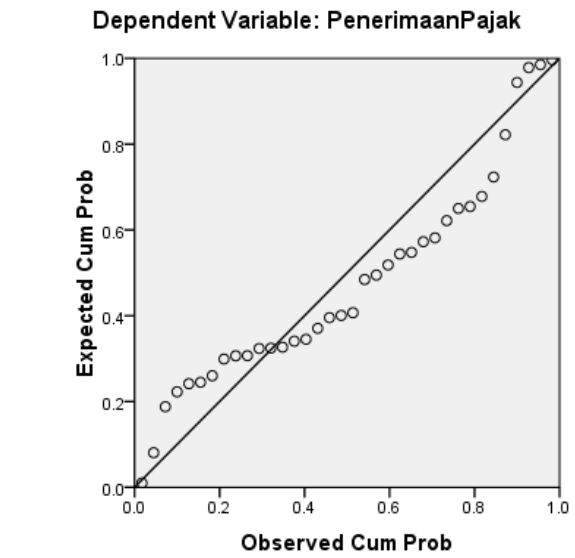
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. (Suryadi, 2006:105)	Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat naik turunnya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya. Suparmono dan Theresia (2010:1)	Rasio

Tabel 4.4
Uji Normalitas Model Regresi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters[a]	Mean	.0000210
	Std. Deviation	1.76527061E10
Most Extreme Differences	Absolute	.150
	Positive	.150
	Negative	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		.903
Asymp. Sig. (2-tailed)		.389

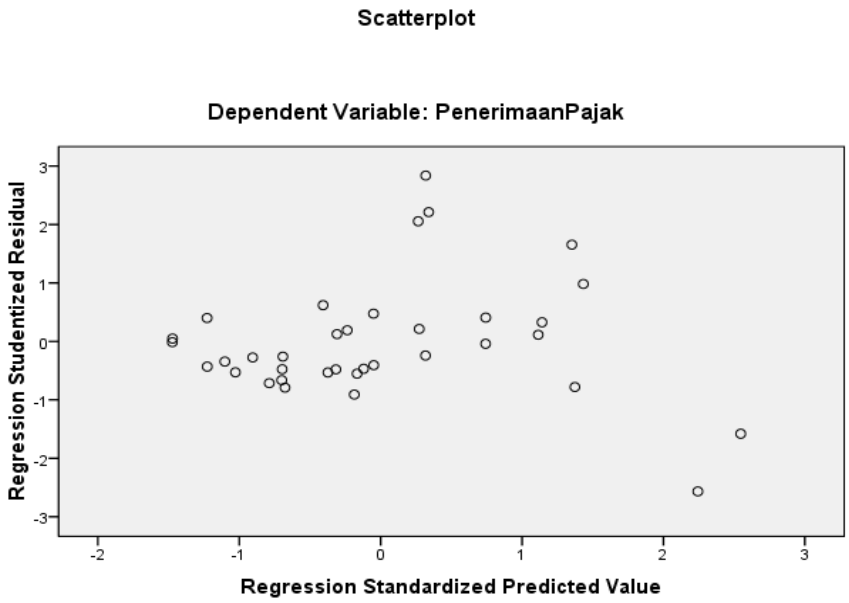
a. Test distribution is Normal.



Gambar 4.4
Grafik Normalitas

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas
Coefficients[a]

Model		Collinearit Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PenagihanPajak	.978	1.023
	TunggakanPajak	.978	1.023



Gambar 4.5
Grafik *Scatterplot*

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.820[a]	.672	.652	1.81798E10	1.741

a. Predictors: (Constant), TunggakanPajak, PenagihanPajak

b. Dependent Variable: PenerimaanPajak

Tabel 4.7

Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak

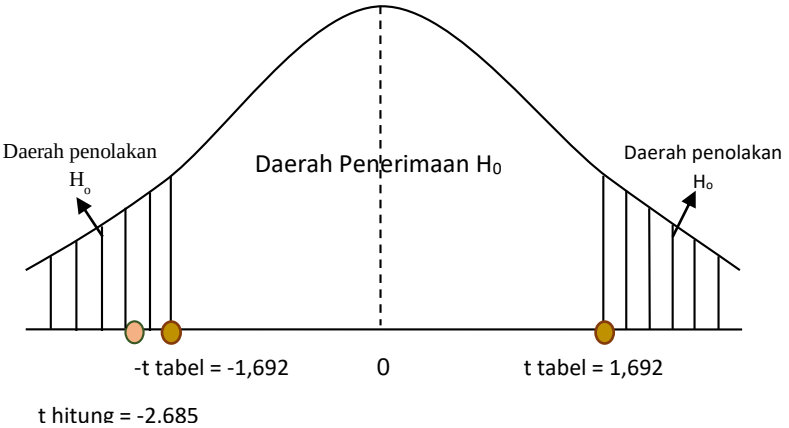
Tabel 4.11

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.816E10	2.625E10		-2.215	.034
	PenagihanPajak	-63.471	23.638	-.271	-2.685	.011
	TunggakanPajak	19.489	2.674	.735	7.290	.000

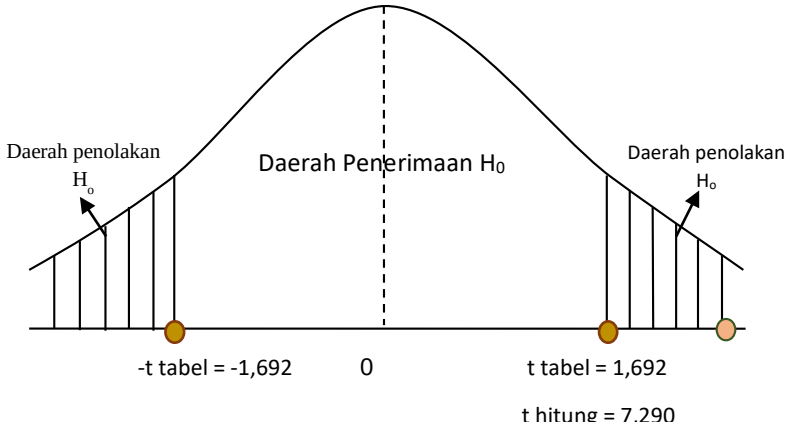
Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-58161373380,629	26252612110,728		-2,215	,034
	Penagihan Pajak	-63,471	23,638	-,271	-2,685	,011
	Tunggakan Pajak	19,489	2,674	,735	7,290	,000



Gambar 4.6
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Variabel Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak



Gambar 4.7
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Variabel Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak